

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Partisipasi

Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan, terutama dalam kegiatan pembangunan. Menurut Cohen dan Uphoff (1979) partisipasi merupakan sebuah syarat dalam upaya keberhasilan pembangunan. Partisipasi menjadi salah satu syarat yang menentukan bahwa pembangunan dapat dianggap berhasil. Berkenaan dengan pembangunan pedesaan, Cohen dan Uphoff (1979) melihat bahwa, Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana keputusan tersebut dilakukan, keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program dan keputusan dengan menyumbangkan berbagai sumber daya atau kerja dalam organisasi yang lebih spesifik, mereka berbagi manfaat dalam program pembangunan serta keterlibatan mereka dalam upaya untuk mengevaluasi program.

Pengertian partisipasi menurut Mardikanto (2013) yaitu keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud disini bukan bersifat pasif tetapi secara aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Oleh itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan di dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri. Verhagen *dalam* Mardikanto (2013) mengungkapkan bahwa sebagai suatu kegiatan, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab dan manfaat.

Mardikanto (2013) menyebutkan bahwa pada konteks kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Hal ini dimaksudkan, agar melalui partisipasi yang diberikan berarti benar – benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga menurut keterlibatan masyarakat yang akan

diperbaiki mutu hidupnya. Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan partisipasi merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela baik itu karena alasan – alasan dari dalam (*intrinsik*) maupun dari luar (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi dan pengawasan), serta pemanfaatan hasil – hasil kegiatan yang dicapai (Mardikanto, 2013).

Maryati (2007), menjelaskan partisipasi petani adalah sikap kerja sama petani dalam pelaksanaan program penyuluhan dengan cara menghadiri kegiatan penyuluhan, demonstrasi metode baru dan usaha mereka memajukan pertanian. Omotheso *et al* (2016), menjelaskan bahwa, partisipasi petani yang kurang baik telah dikemukakan menjadi bagian tanggung jawab atas buruknya kinerja dan kegagalan kelompok tani atau gapoktan. Kesadaran akan tingkat partisipasi anggota kelompok petani atau gapoktan akan memberi pengertian yang bermanfaat untuk lembaga penyuluhan dan pembuat kebijakan dalam memperkuat kelompok yang ada.

Partisipasi petani dalam suatu kegiatan atau proyek merupakan suatu bentuk perwujudan dari besarnya penilaian petani atas keuntungan dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Partisipasi diprediksi akan terus berlanjut selama petani merasa puas atau diuntungkan dengan ikut serta dalam kegiatan tersebut (Irawan,2011). Partisipasi petani menjadi faktor penting untuk keberlanjutan pertanian di areal pedesaan. Persoalan partisipasi petani diberbagai daerah menjadi perhatian baik di tingkat nasional maupun daerah. Tanpa adanya partisipasi tentunya tidak ada perkumpulan, tidak ada pembangunan dan tidak ada program.

2. Lingkup Partisipasi

Cohen dan Uphoff (1979), menyebutkan bahwa Partisipasi dibagi dalam empat jenis partisipasi yang paling signifikan dalam kegiatan pembangunan pedesaan diantaranya yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam implementasi, partisipasi dalam menerima manfaat dan partisipasi dalam evaluasi. Slamet (1993), mengemukakan adanya tiga bentuk kegiatan partisipasi

yaitu partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan dan partisipasi dalam tahap pemanfaatan.

a. Partisipasi Dalam Tahap Perencanaan

Keterlibatan seseorang dalam perencanaan pembangunan sekaligus membawa dalam proses pembentukan keputusan, mencakup empat tingkatan. Pertama, ialah mendefinisikan situasi yang menghendaki adanya keputusan. Kedua, memilih alternatif yang cocok untuk dipilih sesuai kondisi dan situasi. Ketiga, menentukan cara terbaik agar keputusan yang telah dibuat dapat dilaksanakan. Dengan demikian dalam tahapan ketiga ini merupakan jabaran rencana, operasionalisasi rencana. Keempat, mengevaluasi akibat apa saja yang timbul sebagai akibat dari pilihan keputusan itu. Pengukuran partisipasi dalam tahap perencanaan menggunakan unsur kepengurusan, frekuensi kehadiran dalam rapat, frekuensi mengajukan usul/saran dan diterima tidaknya usul/saran yang disampaikan.

b. Partisipasi Dalam Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, pengukuran titik tolak pada sejauh mana masyarakat secara nyata terlibat dalam aktivitas – aktifitas *riil* yang merupakan perwujudan program – program yang telah digariskan di dalam kegiatan – kegiatan fisik. Pengukuran partisipasi dalam tahap pelaksanaan menggunakan unsur bentuk bantuan (tenaga, uang dan atau materi yang disumbangkan).

c. Partisipasi Dalam Tahap Pemanfaatan

Pada tahap pemanfaatan ialah partisipasi masyarakat dalam fase penggunaan atau pemanfaatan hasil – hasil kegiatan pembangunan. Partisipasi dalam tahap pemanfaatan di ukur dari sejauh mana anggota masyarakat memetik hasil dari program yang dilakukan.

Dwiningrum (2011), membedakan partisipasi dalam empat jenis yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam evaluasi dan partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan alternative dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide tang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi ini masyarakat menuntut hak untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran

rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam evaluasi, partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.

Yadav *dalam* Mardikanto (2013), menjelaskan bahwa terdapat empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil – hasil pembangunan. Berikut adalah uraian dari empat macam kegiatan tersebut :

a. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Umumnya, setiap program pembangunan masyarakat selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat yang dalam banyak hal kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan perlu ditumbuhkan melalui pembukaan forum diskusi yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program – program pembangunan di wilayah setempat.

b. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korban lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing – masing warga masyarakat yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan pembangunan, harus adanya partisipasi masyarakat pada pemeliharaan proyek – proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil – hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati dalam jangka panjang.

c. Partisipasi Dalam Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program serta proyek pembangunan sangat diperlukan agar tujuan dapat dicapai sesuai yang diharapkan, juga untuk

memperoleh umpan balik mengenai masalah – masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Maka dari itu, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

d. Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Perlu adanya pemerataan terkait pemanfaatan hasil pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak, karena pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Dalam partisipasi terdapat beberapa bentuk kegiatan partisipasi yang diberikan masyarakat dalam suatu program atau kegiatan. Menurut Dosseldorp *dalam* Mardikanto (2013), menyatakan bentuk – bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa :

- 1) Menjadi anggota kelompok – kelompok masyarakat.
- 2) Melibatkan diri pada diskusi kelompok.
- 3) Melibatkan diri pada kegiatan – kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
- 4) Menggerakkan sumberdaya masyarakat.
- 5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- 6) Memanfaatkan hasil – hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

3. Tingkat Partisipasi

Wilcox *dalam* Mardikanto (2013), menyatakan, dilihat dari tingkat atau tahapan partisipasi terdapat 5 tingkatan yaitu :

- a. Memberikan informasi (*information*).
- b. Konsultasi (*consultation*) yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
- c. Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*), dalam arti memberi dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan – pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.

- d. Bertindak bersama (*acting together*), dalam arti tidak sekedar ikut serta dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
- e. Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*) dimana kelompok – kelompok local menawarkan pendanaan, nasehat dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

4. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) merupakan salah satu upaya pemerintah yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga baik di tingkat petani/produsen dan di tingkat konsumen. Melalui kegiatan ini, gapoktan dan Toko Tani Indonesia (TTI) diberdayakan untuk dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga distribusi dalam suatu rantai distribusi yang lebih efisien sehingga dapat mengurangi disparitas harga antara produsen dan konsumen. Bantuan pemerintah yang diberikan kepada gapoktan dalam kegiatan ini digunakan untuk memperkuat permodalan untuk menyerap gabah yang diproduksi petani dengan harga minimum sama dengan harga pangan pokok (HPP). Sehingga gapoktan dapat berperan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani terutama pada saat panen raya. Bantuan pemerintah juga digunakan untuk mendukung pengolahan pasca panen sehingga gapoktan dapat menyediakan beras berkualitas baik dengan harga yang wajar dan lebih terjangkau bagi masyarakat (Badan Ketahanan Pangan, 2016).

Program PUPM secara tidak langsung berperan dalam mengatasi rendahnya harga pada masa panen raya dan tingginya harga saat ketersediaan pangan sedikit. Pada sisi pemasaran, gapoktan difasilitasi membentuk kemitraan dengan Toko Tani Indonesia (TTI) yang merupakan lembaga distribusi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mekanisme pemasaran melalui TTI akan memperpendek rantai pasok komoditas pangan sehingga tercipta margin keuntungan yang lebih adil bagi seluruh pihak di dalam rantai pasok dan menjaga kepastian harga dan pasokan bagi produsen dan konsumen (Badan Ketahanan Pangan, 2016).

Program PUPM ini telah dilaksanakan sejak tahun 2016 di 32 (tiga puluh dua) provinsi dan di 7 (tujuh) provinsi di tahun 2017. Pada tahun 2018 kegiatan

ini dikembangkan dengan beberapa penyempurnaan konsep dan teknis pelaksanaan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang di hadapi selama melaksanakan program PUPM tahun 2016 dan tahun 2017 baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut Keputusan Menteri Pertanian (2018), konsep dari Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Program PUPM

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) adalah sebagai berikut :

- 1) Menyerap produk pertanian nasional dengan harga yang layak dan menguntungkan petani khususnya bahan pangan pokok dan strategis.
- 2) Mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis.
- 3) Memberikan kemudahan akses kepada masyarakat/konsumen terhadap bahan pangan pokok dan strategis yang berkualitas, dengan harga yang wajar.

b. Sasaran Program PUPM

Sasaran dari kegiatan program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) pada tahun 2018 terdiri dari sasaran LUPM dan TTI. LUPM merupakan singkatan dari Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yaitu lembaga usaha bersama yang berkembang di masyarakat antara lain : Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Tani (Poktan), lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan, bergerak di bidang produksi/usaha pangan, berorientasi bisnis, memiliki legalitas dan struktur organisasi. Toko Tani Indonesia yang selanjutnya di singkat menjadi TTI adalah toko/warung/kios miliki pedagang komoditas pangan baik perorangan maupun lembaga yang ditetapkan untuk menjual komoditas pangan pokok dan strategis dari LUPM dan mitra industri pangan dengan harga sesuai ketentuan dalam program PUPM.

Sasaran LUPM berjumlah 1.156 (seribu seratus lima puluh enam) LUPM yang terdiri dari : (1) 500 (lima ratus) LUPM tahap penumbuhan, (2) 406 (empat ratus enam) LUPM tahap pengembangan, dan (3) 250 (dua ratus lima puluh) di kabupaten/kota yang mengalami ketidakstabilan harga dan pasokan pangan pokok/strategis pada 22 provinsi.

c. **Komponen Kegiatan**

1) **Penetapan Harga Pangan**

Harga yang perlu ditetapkan agar tujuan PUPM tercapai antara lain sebagai berikut :

a) **Komoditas Beras**

Harga jual oleh LUPM dan harga eceran tertinggi beras di Toko Tani Indonesia (TTI) ditetapkan dengan mengacu kepada kebijakan yang berlaku dalam rangka stabilisasi harga pangan pada Badan Ketahanan Pangan.

b) **Komoditas Cabai dan Bawang Merah**

Penjualan cabai dan bawang merah di JABODETABEK, harga jual oleh LUPM dan harga eceran tertinggi ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan. Sementara itu untuk penjualan cabai dan bawang merah di wilayah LUPM, harga jual LUPM dan harga eceran tertinggi di TTI ditetapkan oleh Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan di tingkat provinsi.

2) **Ketentuan Kualitas Produk Pangan**

Ketentuan kualitas untuk komoditas beras adalah sesuai dengan standar mutu beras medium, yaitu kadar air maksimal adalah 14%, derajat sosoh minimal 95%, butir patah maksimal 15% dan butir kepala minimal 85%. Ketentuan kualitas bawang merah harus memperhatikan beberapa hal yaitu kesamaan sifat varietas, umbi cukup tua, keras dengan tingkat kekeringan sama dengan kering simpan, kadar air 75 – 85 % dan tidak bercampur dengan kotoran lain. Kualitas cabai merah yang akan di pasok harus memperhatikan beberapa hal yaitu keseragaman warna, keseragaman ukuran, bebas dari cemaran benda asing dan toleransi terhadap busuk pada buah maksimal 2%.

3) **Ketentuan Kemasan**

Produk beras yang dipasarkan dan disalurkan kepada Toko Tani Indonesia (TTI) yaitu dalam kondisi sudah dikemas oleh LUPM sebelum dipasok ke TTI. Bentuk, desain dan logo kemasan (khusus komoditas beras) ditentukan oleh Kementerian Pertanian. Komoditas pangan strategis lainnya seperti cabai dan bawang merah, kemasan menyesuaikan dengan sifat dan karakteristik produk serta mempertimbangkan keamanan dalam pengangkutan.

4) **Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan PUPM**

Pembinaan dan pendampingan dilakukan secara berjenjang pada setiap tingkatan mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan, ditingkat Provinsi oleh Dinas /Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten oleh Dinas /Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota. Tugas pembinaan dan pendampingan kegiatan PUPM dalam bentuk :

- a) Sosialisasi tentang maksud, tujuan, manfaat serta dukungan dalam program PUPM.
- b) Penyampaian komitmen kepada LUPM untuk memasok hasil produk pertaniannya kepada TTI atau Institusi/Lembaga Distribusi dan Logistik dengan senantiasa menjaga kualitas produk yang dipasok.
- c) Melakukan fasilitasi dalam hal penguatan kelembagaan LUPM dan TTI, peningkatan kemampuan manajerial TTI (perencanaan penjualan, pembukuan kegiatan dan pelaporan), serta pengembangan jejaring kemitraan usaha TTI dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

5. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

a. Pendidikan Non Formal

Suhardiyono *dalam* Prima (2012) menyebutkan pendidikan non formal merupakan pengajaran sistematis yang diorganisir dari luar sistem pendidikan formal bagi sekelompok orang yang memenuhi keperluan khusus, contohnya yaitu penyuluhan pertanian. Menurut Kartasapoetra *dalam* Prima (2012), menyatakan bahwa penyuluhan merupakan sistem pendidikan yang bersifat nonformal atau sistem pendidikan diluar sistem persekolahan. Petani harus aktif dalam mengikuti penyuluhan – penyuluhan sehingga adopsi (penerapan) teknologi atau hal – hal baru akan meluas dan berkembang. Selain itu kegiatan penyuluhan juga merupakan wadah transfer ilmu, informasi dan sebagai wadah penyampaian dan penyesuaian program nasional dan regional agar dapat diikuti dan dilaksanakan oleh petani. Sehingga program – program masyarakat yang disusun dengan baik akan berhasil dan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Menurut Setiana (2005) penyuluhan dapat diartikan sebagai suatu pendidikan non formal di luar sistem sekolah yang biasa. Fungsi penyuluhan

adalah untuk menjembatani kesenjangan antara praktik yang biasa dijalankan oleh petani dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang yang menjadi kebutuhan petani. Semakin aktif petani dalam mengikuti kegiatan penyuluhan diharapkan meningkatkan kemampuan petani. Sehingga lewat pendidikan non formal seperti penyuluhan dapat meningkatkan taraf pendidikan petani. Selanjutnya Khairudin (1992), menyatakan, rendahnya partisipasi masyarakat juga disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang mereka miliki seperti pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya korelasi positif antara pendidikan dengan partisipasi pembangunan pertanian atau dengan kata lain, mereka yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi, partisipasinya akan lebih tinggi pula.

Menurut Triana (2017), menyatakan bahwa kehadiran petani yang tinggi dalam setiap kegiatan penyuluhan terutama tentang program akan berpengaruh terhadap program tersebut. Petani yang selalu aktif dalam kegiatan penyuluhan akan banyak mengalami proses pembelajaran tentang program sehingga petani paham akan tujuan program tersebut. Hal ini akan menarik minat petani untuk berpartisipasi dalam program. Dengan kata lain, semakin tinggi frekuensi penyuluhan yang dilaksanakan petani maka semakin tinggi juga tingkat partisipasi petani.

b. Akses Informasi

Menurut Fanami (2017) Akses informasi adalah ketercukupan media untuk menyalurkan arus informasi dan model komunikasi yang terbentuk. Akses informasi tidak terbatas pada media formal saja. Namun juga meliputi media informal. Mengingat media tersebut tersebut lebih efektif dan umum diterima oleh sebagian besar masyarakat desa.

Menurut Wulandari (2011), akses informasi adalah pencapaian, peraihan atau perolehan akan informasi tanpa atau dengan menggunakan *tool* berupa telekomunikasi dan saluran atau media. Akses informasi pada perpustakaan kemudian terbagi menjadi dua, yaitu akses informasi *online* dan *offline*. Akses informasi *online* merupakan akses informasi melalui berbagai media elektronik yang memiliki sistem computer didalamnya. Akses informasi *offline* diterapkan pada perpustakaan tradisional atau manual. Seseorang atau kelompok yang ingin

mendapatkan informasi tertentu harus datang ke perpustakaan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa akses informasi merupakan suatu kemudahan yang dirasakan oleh seseorang atau masyarakat dalam memperoleh informasi dan sumber informasi atau pengetahuan. Akses informasi dapat dikatakan sebagai jembatan yang menghubungkan sumber informasi. Sehingga informasi yang dibutuhkan oleh setiap individu dapat terpenuhi.

Akses terhadap kebutuhan informasi di akui sebagai hak dasar bagi setiap orang. Namun pada masyarakat terdapat kesenjangan, yaitu antara masyarakat yang mempunyai akses yang lebih terhadap informasi dan masyarakat yang kurang mempunyai akses informasi. Masyarakat miskin informasi sulit mendapatkan akses informasi karena perbedaan kemampuan ekonomi, sedangkan masyarakat yang kaya mudah mendapatkan informasi. Selain kemampuan ekonomi, masalah kesadaran pentingnya informasi juga perlu dijadikan perhatian.

Menurut Fatmawati (2016), dalam akses informasi perlu adanya pertimbangan seperti *easy of navigation, convenience, modern equipment* dan *self reliance*. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. *Easy of Navigation* (kemudahan akses), yaitu berkaitan dengan kemudahan dalam pencarian informasi yang diinginkan secara mandiri tanpa perlu adanya bantuan dari pihak lain.
2. *Convenience* (kenyamanan individu), yaitu berkaitan dengan kenyamanan dalam mencari informasi, meliputi kecepatan waktu yang diperlukan dan tidak ditemukannya hambatan dalam mendaptnkan kemudahan informasi yang dibutuhkan.
3. *Modern Equipment* (peralatan yang modern), yaitu berkaitan dengan tersedianya fasilitas atau peralatan yang mendukung sesuai keadaan zaman dan teknologi yang berkembang.
4. *Self Reliance* (kepercayaan diri), yaitu berkaitan dengan kepercayaan diri atau keyakinan dalam menggunakan fasilitas sarana akses informasi dan atau petunjuk tata cara penelusuran informasi yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian Zaenal Fanami (2017) yang berjudul "Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Penganggaran dan Pendapat Asli Desa", Zaenal Fanami menyatakan bahwa akses informasi mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat.

c. Pengetahuan Petani Tentang Program

Pengetahuan adalah suatu proses dimana seseorang berusaha untuk melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengamatan terjadi melalui panca indra manusia, baik dari penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Walaupun demikian, pengetahuan sebagian besar diperoleh melalui mata (penglihatan) dan telinga (pendengaran). Tingkat pengetahuan petani dapat mempengaruhi partisipasi petani, Karena semakin tinggi tingkat pengetahuan petani tentang program PUPM maka semakin tinggi juga partisipasinya.

Menurut Resti *et al* (2019), terdapat hubungan yang nyata antara tingkat pengetahuan petani tentang program dengan tingkat partisipasi petani, meningkatnya pengetahuan responden tentang program akan membuat responden termotivasi dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupannya. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Yama (2018), yang menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan tentang program berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi pada program. Menurut Triana (2017), tingkat pengetahuan petani tentang program berpengaruh dalam partisipasi petani, karena semakin tinggi pemahaman petani tentang program tersebut maka semakin tinggi juga tingkat partisipasinya.

d. Pendapatan

Menurut Sukirno *dalam* Lumintang (2013), pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Beliau menambahkan bahwa pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama periode waktu tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.

Menurut Soekartawi (1988), petani dengan tingkat pendapatan tinggi akan lebih mudah melakukan sesuatu yang diinginkan sehingga akan lebih aktif dalam berpartisipasi dibandingkan dengan petani yang berpendapatan rendah. Sedangkan

petani berpendapatan rendah cenderung pasif. Mardikanto (1993), mengemukakan bahwa faktor pendapatan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi yaitu dimana tingkat kemampuan ekonomi seseorang yang secara ekonomi mampu dengan kata lain tingkatan pendapatan tinggi, akan lebih mudah menyediakan modal untuk berpartisipasi.

e. Motivasi

Motivasi merupakan dorongan dari dalam individu untuk melakukan suatu tindakan dan memberi tujuan dan arah kepada perilaku individu (Ahmadi, 2007). Menurut Malta dalam Anggreany *et al* (2016), motivasi merupakan modal yang sangat penting bagi petani untuk menunjang kesuksesan dalam berusahatani, dimana motivasi yang tinggi diperlukan untuk mendorong petani dalam berusahatani dan menerima atau mengadopsi informasi atau teknologi yang berguna meningkatkan hasil usahatannya.

Motivasi utama keikutsertaan anggota kelompok tani adalah didorong oleh hasrat meningkatkan kemampuan berusahatani dan pemenuhan kebutuhan primer, terutama untuk mendapatkan sarana produksi pertanian dan peternakan yang mencukupi (Mardikanto, 1993). Tinggi atau rendahnya motivasi petani akan menentukan tingkat partisipasi petani dalam suatu kegiatan atau program berdasarkan hasrat untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan terutama melalui kegiatan PUPM. Menurut Triana (2017), menyatakan bahwa motivasi mempengaruhi partisipasi petani karena semakin tinggi motivasi petani maka semakin tinggi juga tingkat partisipasi petani tersebut.

f. Kekosmopolitan

Rogers dan Shoemaker (1971), menjelaskan bahwa kosmopolitan adalah kesediaan seseorang untuk berusaha mencari ide – ide baru dari luar lingkungannya atau tingkat keterbukaanya seseorang dalam menerima pengaruh dari luar. Menurut Rogers dan Shoemaker (1986), menyatakan bahwa semakin kosmopolit seseorang, akan semakin luas wawasan dan pergaulannya. Memudahkan seseorang untuk mencari solusi dalam menghadapi persoalan – persoalan. Seseorang yang mempunyai kosmopolit yang tinggi relatif lebih dahulu terbuka pada inovasi. Kekosmopolitan itu pula yang memungkinkan orang memiliki sikap yang relatif menyukai perubahan dari pada anggota sistem lainnya.

Pada seseorang yang memiliki kekosmopolitan yang tinggi relatif lebih terbuka pada hal baru dan perubahan sehingga menciptakan peluang dalam meningkatkan partisipasi petani dalam suatu kegiatan dan program.

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Diarsi Eka Yani *et al* (2012) kosmopolitan berhubungan nyata dengan partisipasi anggota kelompok tani dalam penyusunan perencanaan program dan dalam hal penetapan masalah dan penetapan cara mencapai tujuan. Menurut Ayuk dan Tinjung (2018) menunjukkan bahwa variabel kosmopolitan memiliki hubungan signifikan dengan partisipasi peternak. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Roger dan Shoemakers (2003) bahwa pandangan petani akan semakin kosmopolitan jika sering berhubungan dengan orang luas.

Menurut Triana (2017) tingkat kosmopolitan merupakan keterbukaan petani terhadap lingkungan sekitarnya seperti lembaga yang dikenal petani, hubungan petani dengan tokoh masyarakat lain dan pemanfaatan media massa. Semakin tinggi tingkat kosmopolitan maka semakin tinggi juga tingkat partisipasi petani dalam program. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Wijaya (2010) yang menyatakan bahwa tingkat kosmopolitan mempengaruhi tingkat partisipasi petani dalam program.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai partisipasi petani menjadi literatur atau referensi sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Thalia Malirisa Murphy dan Dina Novia Primingtyas (2019)	Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Petani Dalam Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) Di Desa	Usia, Pendidikan, Pengalaman Berusahatani, Luas Lahan Dan Pendapatan.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor usia, pendidikan, pengalaman berusahatani, luas lahan dan pendapatan secara bersama – sama memiliki pengaruh terhadap partisipasi

Lanjutan Tabel 1. Penelitian Terdahulu

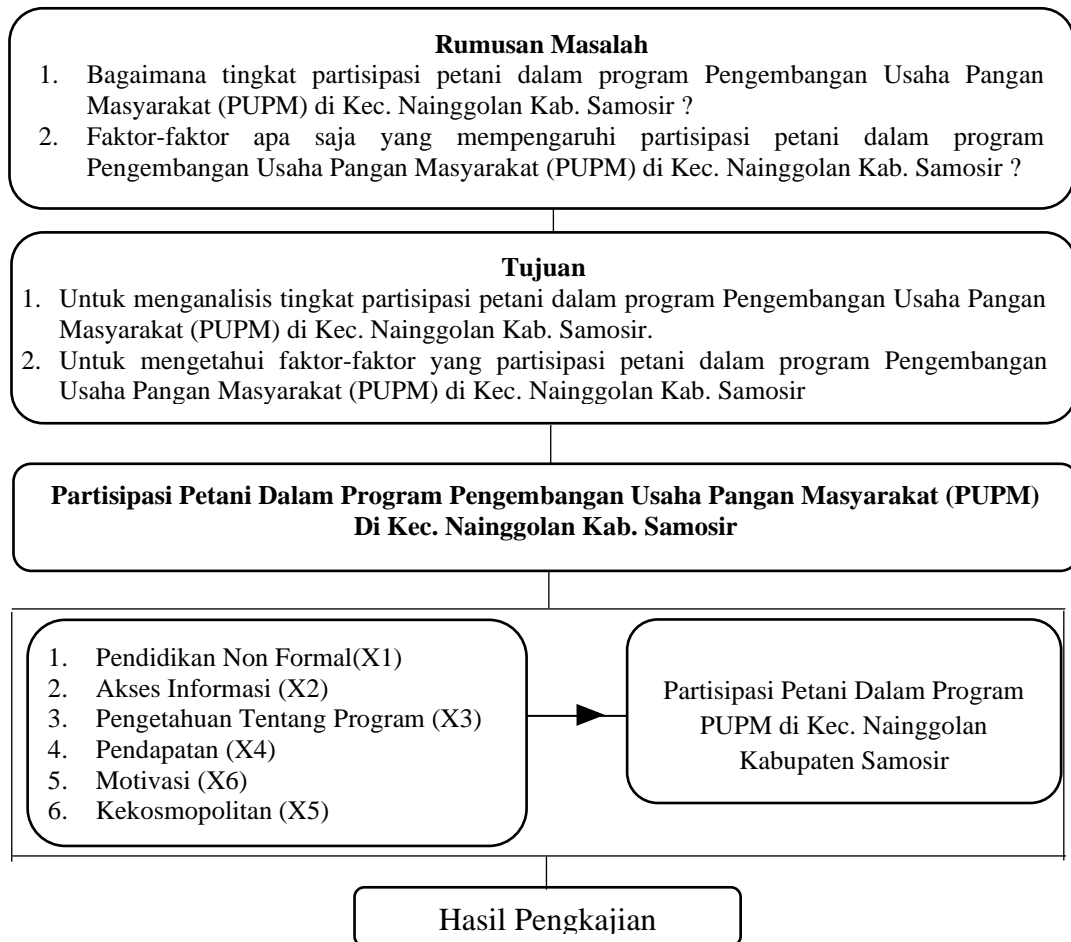
		Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.		petanu dalam program AUTP.
2.	Asep Sudrajat, Hardjanto, dan Leti Sundawati (2016)	Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari Di Desa Cikeusal dan Desa Kanangan Kabupaten Kuningan.	Faktor Internal (Umur, Pendidikan, Luas Kepemilikan Hutan dan Pengalaman Petani), Faktor Eksternal (Penyuluhan, Kelompok Tani dan Akses Informasi) dan Kompetensi.	Partisipasi petani berpengaruh nyata terhadap kelestarian hutan rakyat, namun tidak berpengaruh bagi kesejahteraan petani. Kelestarian hutan rakyat juga dipengaruhi secara langsung oleh faktor internal, faktor eksternal, dan kompetensi petani. Namun kesejahteraan petani tidak dipengaruhi secara nyata baik oleh faktor internal, faktor eksternal, kompetensi petani, partisipasi, maupun kelestarian hutan rakyat.
3.	Isyaturriyadhah, Asnawati Is dan Effy Yudiawati (2017)	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota Gabungan Kelompok Tani Tanjung Sehati Dalam Kegiatan Kelompok Di Kabupaten Merangin.	Usia, Motivasi, Kepemimpinan Gapoktan, Peran Pemerintah Desa, Peran Penyuluh, dan Peran Pedagang Desa.	Tingkat partisipasi anggota Gapoktan pada kegiatan berkelompok berada pada kategori tinggi. Dengan pencapaian persentase yaitu 84 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota kelompok tani dalam kegiatan kelompok adalah motivasi, kepemimpinan Gapoktan, peran pemerintah desa dan peran penyuluh.
4.	S. Baba, Isbandi, T. Mardikanto,	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi	Umur, Pendidikan Formal,	Karakteristik peternak yang terdiri dari umur, tingkat

dan Waridin (2017)	Tingkat Partisipasi Peternak Sapi Perah Dalam Penyuluhan Di Kabupaten Enrekang.	Kosmopolit, dan Persepsi Peternak Terhadap Penyuluhan.	pendidikan formal, tingkat kosmopolit dan pengalaman usaha mempengaruhi partisipasi peternak dalam penyuluhan. Semakin tinggi umur, tingkat pendidikan formal, tingkat kosmopolit dan pengalaman usaha, partisipasi peternak dalam penyuluhan semakin menurun. Mereka mempunyai alternatif lain dalam memperoleh sumber informasi selain penyuluhan.
5. Rizka Shafira Triana (2017)	Partisipasi Petani Dalam Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (UP2PJK) di Kecamatan Seputih Kabupaten Lampung Tengah	Penyuluhan, pengetahuan petani tentang program, frekuensi mengikuti kegiatan penyuluhan, tingkat motivasi petani dan tingkat kekosmopolitan.	Faktor – faktor yang berpengaruh nyata dengan tingkat partisipasi petani dalam program UP2PJK yaitu tingkat pengetahuan petani tentang program, frekuensi mengikuti kegiatan penyuluhan, tingkat motivasi petani dan tingkat kekosmopolitan. Sedangkan faktor – faktor yang tidak berpengaruh nyata ialah frekuensi mengikuti kegiatan.

C. Kerangka Pikir

Partisipasi petani menjadi faktor penting untuk keberlanjutan pertanian di areal pedesaan. Tanpa adanya partisipasi tentunya tidak ada perkumpulan, tidak ada pembangunan dan tidak ada program. Partisipasi petani juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akan meningkatkan tingkat partisipasinya sehingga faktor – faktor tersebut diantaranya 1) pendidikan non formal, 2) akses informasi, 3)

pengetahuan petani tentang program, 4) pendapatan, 5) motivasi dan 6) kekosmopolitan terhadap program tersebut. Partisipasi petani tersebut memiliki beberapa tahap diantaranya tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program. Berdasarkan Uraian Diatas, secara sistematis kerangka berpikir pada penelitian ini ditampilkan pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pikir Partisipasi Petani Dalam Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Di Kec. Nainggolan Kabupaten Samosir.

Pada gambar kerangka pikir diatas merupakan implementasi dari rumusan masalah dan tujuan pengkajian ini. Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa variabel X yang terdiri atas pendidikan non formal (X1), akses informasi (X2), pengetahuan petani tentang program (X3), pendapatan (X4), motivasi (X5) dan kekosmopolitan (X6) mempengaruhi tingkat partisipasi petani dalam program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Selanjutnya, dianalisa faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dalam program Pengembangan

Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) untuk dapat dibuat rencana tindak lanjut dari pengkajian ini.